

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl.Raya Pasirjambu No.139 Ciwidey Kab.Bandung

Nomor Telepon : 0225928680

Penjelasan Umum : Analisis 1.Struktur & Infrastruktur Tata Kelola: Struktur & Infrastruktur Tata Kelola Bank Hayura Artalola telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 2. Proses Tata Kelola ; Proses tata kelola atas struktur & infrastruktur telah berjalan dengan cukup efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK hal ini sebagian besar karena human error; 3. Hasil Tata Kelola :Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik & permasalahan yg terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik. Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola tahun 2021 diperoleh nilai komposit 2.0 dengan peringkat komposit adalah Baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dedi Rusamsi	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2. Mengelola BPR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar BPR; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai secara kuantitas maupun kualitas; menindaklanjuti temuan audit intern maupun ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris maupun OJK; 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; 6. Mengungkap kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 8. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APU & PPT; 9. Menetapkan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2	Teulis Ratna Komala	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Membantu Direktur Utama dalam mengelola dan pengawasan operasional BPR; 2. Menyusun RBB untuk diajukan dan mendapat persetujuan RUPS; 3. Melaksanakan penerapan manajemen risiko pada setiap unit dan jenjang organisasi; 4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan RBB; 5. Melaksanakan pengendalian keuangan secara menyeluruh; 6. Memastikan bahwa proses manajemen risiko pada aktivitas fungsional usaha bank dilakukan secara terintegrasi pada unit jenjang organisasi; 7. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8. Memastikan terhadap pemenuhan komitmen BPR terhadap otoritas.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direktur Utama 63 % dari 11 Tugas dan tanggungjawab telah dilaksanakan termasuk baik

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Operasional Merangkap pelaksana fungsi kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H.Mutiq Yusmita Hadyat	Komisaris Utama	Komisaris Utama, a) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku, atas dasar keputusan RUPS, b) Melakukan Pengawasan kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada direksi secara independen c) memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank d) membentuk Audit Internal dalam membantu tugasnya dalam pelaksanaan GCG melalui pengangkatan Pejabat Eksekutif, e) meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal, pengawasan OJK; f) Tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan sesuai ranahnya komisaris yang berkaitan dengan penyimpangan penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal yang di tetapkan anggaran dasar atau perundangan yang berlaku
2	Tatan Suratman,SE	Komisaris	1.Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa Dirksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan APU & PPT 5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen risiko, Kebijakan dan Pedoman APU & PPT, 6. Memberitahukan kepada OJK apabila ada : a.Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.7.Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi seta agenda rapat komisaris. 8.Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris

## Rekomendasi Kepada Direksi

Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya secara independen sesuai ketentuan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan tugas dan tanggung jawab direksi sesuai ketentuan yang berlaku

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Komisaris telah memberikan saran dan arahan terkait adanya hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan usaha BPR baik secara lisan dan tertulis sesuai ketentuan, melakukan rapat dewan komisaris sedikitnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Modal inti dibawah 50 M tidak wajib membentuk komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dedi Rusamsi	54.000.000	2,46

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota direksi Dedi Rusamsi memiliki kepemilikan saham sebesar 2,46%

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

anggota dewan direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan atau lembaga lain baik bank maupun non bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dedi Rusamsi	Dedi Rusamsi	tidak ada	tidak ada
2	Teulis Ratna Komala	Hj.Teulis Ratna Komala	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Antara anggota direksi tidak terdapat hubungan keuangan satu sama lain baik secara langsung ataupun tidak langsung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dedi Rusamsi	Dedi Rusamsi	tidak ada	tidak ada
2	Teulis Ratna Komala	Hj. Teulis Ratna Komala	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota direksi tidak memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya baik secara vertikal maupun horizontal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	H.Mutiq Yusmita Hadyat	1.027.000.000	46,68

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota komisaris yang memiliki saham pada BPR adalah H.Mutiq Yusmita dengan komposisi 46.68%, sementara Tatan Suratman,SE tidak memiliki kepemilikan saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota dewan komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain baik bank maupun non bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H.Mutiq Yusmita Hadyat	H.Mutiq Yusmita Hadyat	Tidak ada	Hj.Gusti Nurmahrita-Ibu Kandung
2	Tatan Suratman,SE	Tatan Suratman,SE	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan baik langsung ataupun tidak langsung dengan seluruh anggota direksi, namun anggota komisaris atas nama Mutiq Yusmita mempunyai hubungan keuang dengan salah satu pemegang saham yaitu Hj.Gusti Nurmahrita yang merupakan ibu kandung yang bersangkutan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H.Mutiq Yusmita Hadyat	H.Mutiq Yusmita Hadyat	tidak ada	HJ.Gusti Nurmahrita-ibu Kandung
2	Tatan Suratman,SE	Tatan Suratman,SE	tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota dekom tidam mempunyai hubungan keluarga satu dengan yang lainnya,kecuali H. Mutiq Yusmita mempunyai hubungan dengan Pemegang Saham Ibu Kandung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	543600000	2	355500000
2	Tunjangan	2	82648000	2	48675000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>626248000</b>		<b>404175000</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tunjangan diberikan dalam bentuk tunjangan transport untuk dirut Rp.2.5 juta per bulan dan Rp. 1.5 juta kepada Dir.operasional dan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Perusahaan	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Lainnya	Lainnya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas bagi direksi berupa pemakaian mobil dinas yang digunakan oleh direktur utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,06	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,08	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,09	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,08	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komposisi gaji sebagaimana terdaftar

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14-01-2021	2	Evaluasi Kinerja Desember 2021
2	29-04-2021	2	Evaluasi Kinerja Triwulan I 2021
3	15-07-2021	2	Evaluasi Realisasi RBB Semester I 2021
4	17-09-2021	2	Evaluasi Kinerja Agustus dan isu isu strategis tahun 2021 dan 2022

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

prekwensi rapat sesuai dengan ketentuan POJK yang dituangkan dalam risalah rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H.Mutiq Yusmita Hadyat	4	0	100,00
2	Tatan Suratman,SE	4	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat dewan komisaris dilakukan secara fisik dan pengawasan dilakukan kadang melalui telekonpren mengingat situasi dan kondisi pandemi covid-19

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 tidak terjadi penyimpangan atau fraud yang dilakukan komisaris, direksi dan karyawan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2021 tidak terjadi permasalahan hukum baik perdata maupun pidana

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Leni Herlina		Dedi Rusamsi	Direktur Utama	Pinjaman	127	Istri Dirut, keputusan diambil sesuai ketentuan intern
2	Yunita Patrianovita		Dedi Rusamsi	Direktur Utama	Pinjaman	58	Saudara kandung komisaris utama

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Benturan kepentingan terjadi dalam hal pemberi keputusan adalah pihak pihak terkait dengan pemutus, istri, saudara prosedur pemberian kredit sesuai ketentuan internal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210104	Kegiatan Sosial	Sumbangan keamanan	RW Rancabali	25.000
2	20210113	Kegiatan Sosial	Partisipasi polsek	Polsek Pasirjambu	100.000
3	20210115	Kegiatan Sosial	Kebersihan	RW Ciburial Soreang	100.000
4	20210203	Kegiatan Sosial	Pernikahan nasabah	Imas Susanti	100.000
5	20210205	Kegiatan Sosial	Partisipasi RW	RW Rancabali	25.000
6	20210218	Kegiatan Sosial	Partisipasi lingkungan	RW Ciburial Soreang	100.000
7	20210219	Kegiatan Sosial	Pernikahan karyawan	Ikeu	500.000
8	20210226	Kegiatan Sosial	Perisahan Karyawan	Yana Syarif Bastaman	237.000
9	20210303	Kegiatan Sosial	Kemasyarakatan	RW Rancabali	25.000
10	20210312	Kegiatan Sosial	Pernikahan Debitur	Budi	100.000
11	20210312	Kegiatan Sosial	Kebersihan RW	RW Mekargalih	200.000
12	20210312	Kegiatan Sosial	Pernikahan Keluarga Karyawan	Dedi R	1.000.000
13	20210324	Kegiatan Sosial	kebersihan lingkungan RW	RW Rancabali	25.000
14	20210415	Kegiatan Sosial	Kemasyarakatan	RW Ciburial Soreang	100.000
15	20210426	Kegiatan Sosial	Santunan duka	Rina	250.000
16	20210504	Kegiatan Sosial	Keamanan lingkungan	RW Rancabali	25.000
17	20210506	Kegiatan Sosial	Koordinasi Keamanan	Polsek Pasirjambu	150.000
18	20210506	Kegiatan Politik	Partisipasi Ling	RW Mekargalih	150.000
19	20210510	Kegiatan Sosial	Kebersihan Kantor RW	RW Ciburial Soreang	100.000
20	20210518	Kegiatan Sosial	Siskamling	RW Mekargalih	150.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
21	20210531	Kegiatan Sosial	Uang duka	Lando	250.000
22	20210603	Kegiatan Sosial	keamanan wilayah	RW Rancabali	25.000
23	20210609	Kegiatan Sosial	Sosial kemasyarakatan	RW Mekargalih	150.000
24	20210628	Kegiatan Sosial	Santunan wafat	Kematian Nasabah	250.000
25	20210706	Kegiatan Sosial	Keamanan ling	RW Rancabali	25.000
26	20210709	Kegiatan Sosial	Kebersihan ling	RW Mekargalih	150.000
27	20210804	Kegiatan Sosial	Baksos	RW Mekargalih	150.000
28	20210810	Kegiatan Sosial	Ronda	RW Rancabali	25.000
29	20210824	Kegiatan Sosial	Ronda Malam	RW Ciburial Soreang	100.000
30	20210903	Kegiatan Sosial	Lingkungan Sekitar	RW Mekargalih	150.000
31	20210906	Kegiatan Sosial	Lingkungan Bersih	RW Rancabali	25.000
32	20210920	Kegiatan Sosial	Sadar Lingkungan	RW Ciburial Soreang	100.000
33	20210923	Kegiatan Sosial	Jumsih	RW Rancabali	25.000
34	20211004	Kegiatan Sosial	Lingkungan	RW Rancabali	25.000
35	20211005	Kegiatan Sosial	Sadar lingkungan	RW Mekargalih	150.000
36	20211012	Kegiatan Sosial	Santunan nikah	Pernikahan nasabah	100.000
37	20211018	Kegiatan Sosial	Santunan	Pernikahan nasabah	100.000
38	20211122	Kegiatan Sosial	Sosial M	RW Mekargalih	150.000
39	20211025	Kegiatan Sosial	Bakti sosial lingkungan	RW Ciburial Soreang	100.000
40	20211105	Kegiatan Sosial	Baksos RW	RW Rancabali	25.000
41	20211122	Kegiatan Sosial	Security	RW Ciburial Soreang	100.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
42	20211206	Kegiatan Sosial	Jumah bersih	RW Mekargalih	150.000
43	20211221	Kegiatan Sosial	Partisipasi HUT	Panitian HUT Pacira	100.000
44	20211222	Kegiatan Sosial	Kebersihn	RW Ciburial Soreang	100.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian sumbangan dikaitkan dengan CSR kepada sekitar lingkungan kantor berupa kontribusi iuran bulanan, atas kegiatan kegiatan sosial keagamaan masyarakat

Nama BPR	: PT. BPR Hayura Artalola
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl.Raya Pasirjambu Ciwidey Kab.Bandung
Nomor Telepon	: 022 5928680
Modal Inti BPR	: 3.879.717.000,00
Total Aset BPR	: 28.469.855.000,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Simpulan : 1.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Bank Hayura Artalola memadai sesuai dengan POJK, kecuali menyangkut infrastruktur yang perlu perbaikan : 2. Proses Tata Kelola telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat temuan audit intern yang belum ditindaklanjuti secara komprehensif, terutama karena human error dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang belum efektif. 3. Hasil tata kelola termasuk sangat memadai dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri Self Assesment penerapan tata kelola tahun 2021 diperoleh nilai komposit 2,0 dengan predikat komposit adalah BAIK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,90	0,18	1,75	0.350	Sangat baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,90	0,20	1,82	0.273	Baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Baik
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	Baik
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	0,88	0,23	2,31	0.231	Baik
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	0,90	0,20	2,30	0.230	Baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,20	1,50	0.038	Sangat Baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,97	0,20	2,17	0.217	Baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Baik
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	1,00	0,10	2,27	0.170	Baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,50	0,15	1,65	0.124	Sangat Baik
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Komposisi dewan komisaris sesuai dengan ketentuan berjumlah 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama H. Mutiq Yusmita dan Koisaris Tatan Suratman, SE
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah komisaris sama dengan jumlah Direksi yaitu berjumlah 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggotam dewan komisaris telah lulus fit and profer tanggal 27/04/2018
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu anggota komisaris Yaitu Tatan Suratman, SE berdomisili sama dengan propinsi kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Hayura bermodal inti kurang 50 M sehingga tidak wajib memiliki komisaris independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dekom memiliki pedoman dan tata ertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dekom tidak merangkap jabatan di BPR/BPRS lain atau sebagai pejabat eksekuti pada BPR/BPR atau bank umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota dekom dan direksi tidak memiliki hubungan keluarga

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR tidak memiliki komisaris independen
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dekom telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi, termasuk pemenuhan ketentuan prinsip kehati-hatian
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dekom melakukan pengawasan dan memantau serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan BPR, yang di tuangkan dalam rekomendasi tertulis
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dekom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dekom telah memastikan tindak lanjut atas setiap temuan audit intern dan ektern mapun hasil pengawasan OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dekom telah melaksanakan rapat selama tahun 2021 sebanyak 4 kali, minimal setiap triwulan sekali yang dituangkan dalam risalah rapat

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Kebijakan yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat oleh dekom
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Dekom tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang mengurangi keuntungan BPR
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dekom melakukan pengawasan dan memantau serta melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahi fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut BPR
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Setiap hasil rapat dekom dituangkan dalam risalah rapat termasuk bila terjadi dissenting opinions
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR sudah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan namun belum secara menyeluruh. sudah dilakukan pemisahan fungsi dan tugas dan kewenangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Pada periode laporan Anggota Dekom.direksi dan pejabat eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Setiap terjadi benturan kepentingan yang terindikasi dapat mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam keputusan dan di dokumentasikan. pada periode 2021 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan keuangan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M. yang membawahi fungsi kepatuhan saat ini tidak menangani penyaluran kredit
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Cukup memahami perataturan perundang-undangan yang berlaku
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M. BPR membentuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Cukup optimal melakukan melakukan pengkinian pedoman kerja.sistem dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Tugas wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan. walaupun belum dilaksanakan secara optimal.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Dalam menciptakan budaya kepatuhan melalui sosialisasi pelatihan ketentuan terkini dilakukan setiap bulan dan pada saat terdapat ketentuan dan peraturan ter aru
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Budaya kepatuhan di BPR diciptakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan terkini sesuai kebijakan terbaru
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi kepatuhan melakukan pemantauan atas kepatuhan komitmen bank kepada OJK termasuk tindakan pencegahan penyimpangan ketentuan OJK dan perundang undangan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh ketentuan SOP dan kegiatan usaha BPR dilakukan sesuai ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku. bila terdapat ketidak sesuaian minor segera dilakukan penyesuaian dan perbaikan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pengkinian SOP BPR dilakukan revidi secara berkala disesuaikan dengan peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Dalam periode 2021 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan dengan frekwensi dari periode ke periode semakin menurun tidak terdapat pelanggaran berulang

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama ditembuskan kepada dewan komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama periode tahun 2021 tidak terdapat kebijakan dan keputusan direksi yang menyimpang yang perlu dilaporkan khusus kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR bermodal inti kurang dari 50 M dan telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE Audit intern telah memiliki pedoman kerja dan SOP untuk pelaksanaan tugas yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dekom
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkadang dapat dipengaruhi pihak lain.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Rekrutmen belum terprogram sedangkan pengembangan SDM sebagai audit intern selalu dikembangkan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Ketentuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Audit Intern telah disusun BPR sesuai pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Tahapan pelaksanaan audit intern telah dilakukan secara cukup memadai. walaupun terkadang kurang independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	PE Fungsi Audit Inter selama tahun 2021 telah melaporkan langsung ke Direktur Utama dengan tembusan kepada dekom dan dir kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk laporan khusus tahun 2021 telah dilaporkan ke OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50 M. BPR telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Pengangkatan dan pemberhentian PE Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan POJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Pemerisakaan oleh Akuntan Publik dan KAP dtelah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang didasarkan pada pejanjian lingkupkerja audit.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Pelaksanaan Audit Akuntan Publik telah sesuai ketentuan OJK dan telah mendapatkan persetujuan RUPS atas usulan dewan komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tekah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M telah menunjuk seorang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yaitu Sdr. Usep Subhan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPr Trlah memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan SOP Menrisk serta menetapkan limit risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	BPR memiliki kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan selalu mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Kebijakan manajemen risiko dan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris selalu dilaksanakan. kecuali evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan manajemen risiko belum secara maksimal.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Proses manajemen risiko yang bersifat materil saat memberikan layanan kepada nasabah belum dilaksanakan secara maksimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Penerapan sitem pengendalian intern belum secara menyeluruh dilaksanakan. terkecuali berkaitan dengan peraturan eksternal dan internal.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penerapan manajemen risiko mulai Semester 2 tahun 2021 semua jenis risiko yang wajib dikelola telah dilaksanakan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sisten informasi yang cukup memadai dan mampu menyediakan data dan informasi secara LAKU
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Pengembangan budaya sadar risiko dan manajemen risiko melalui kegiatan sosialisasi maupun peningkatan kompetensi SDM sudah cukup optimal dilaksanakan secara berkala.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melakukan penyusunan profile risiko sesuai ketentuan POJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan melaporkan produk dan aktivitas baru kepada OJK sesuai ketentuan. pada periode 2021 tidak terdapat aktifitas baru dan produk baru yang perlu dilaporkan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB) sesuai POJK No.33/POJK.03/2018. termasuk ketentuan BMPK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan penyesuaian mengenai ketentuan BMPK sesuai dengan POJK Nomor 49/POJK.03/2017
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar sesuai dengan ketentuan BMPK dan PKPPB
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu memberikan laporan ada atau tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK pada setiap awal bulan bersamaan dengan Laporan Bulanan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Selama tahun 2021 tidak terjadi pelanggaran dan atau pelampauan BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB telah disusun oleh direksi dan disetujui dewan komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB disusun mencakup dan menggambarkan secara jelas rencana strategis jangka panjang. tahunan termasuk rencana permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan cakupan sebagaimana ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	RBB telah disusun dan memperoleh dukungan dari pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai mencakup SDM. TI. jaringan kantor dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB disusun dengan memperhatikan faktor faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR baik faktor internal maupun eksternal. dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati hatian dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dekom telah melaksanakan fungsi dan tugasnya terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem dan informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan untuk sistem pelaporan keuangan dan non keuangan sehingga laporan yang di hasilkan secara lengkap akurat kini dan utuh sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi triwulanan telah di susun sesuai ketentuan POJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan yang sedikitnya memuat informasi umum. laporan keuangan. opini akuntan publik . tranparansi informasi. serta aspek pengungkapan telah di susun sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi produk. layanan atau penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara. cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan terkait pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hayura Artalola

Posisi Laporan : 31 Desember 2021